



Menapak Asa Pendidikan Inklusif Dari Tepian Nusantara

Cerita Keberhasilan Komunitas
Membuat Perubahan Menjadi Nyata



PROMOTING CIVIL SOCIETY-LED INITIATIVES
FOR INCLUSIVE AND QUALITY EDUCATION IN INDONESIA
(PRO-INQLUED)

***Cerita Perubahan dan Keberhasilan Komunitas
Membuat Perubahan Menjadi Nyata***

**MENAPAK ASA PENDIDIKAN INKLUSIF
DARI TEPIAN NUSANTARA**

Tim Penulis

Aseanty Widaningsih Pahlevi
Yakobus Ngabi Lalapraing
Fachrunnas

Penyunting dan Editing

Rokhmad Munawir
Ari Wahyudi Susatyo
Hardiyanto

Alamat

Jl. Basuki Rahmat RT 006 RW 010, Unit 7
Kompleks Ruko YAMAHA,
Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 13410

Cetakan pertama, Januari 2022

©2022, YAPPIKA ActionAid (Fotografi dan Copyright)

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher

Tentang Program Pro-InQluEd

Program Pro-InQluEd diluncurkan secara resmi pada 18 Mei 2018 oleh Mr. H.E. Vincent Guérend (EU Ambassador to Indonesia and ASEAN) dan Bapak Thamrin Kasman (Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud) bertempat di Kantor Kemendikbud. Dalam agenda launching ini juga dihadiri Reza Rahadian (Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid).

Selain itu juga dihadiri oleh Direktur YAPPIKA-ActionAid; Ketua Pembina YAPPIKA-ActionAid; Direktur GEMAWAN; Ketua Perkumpulan SOLUD; Direktris Yayasan Bahtera; Tim Pelaksana Program Pro-InQluEd YAPPIKA-ActionAid; Tim Pelaksana Program Pro-InQluEd di 3 (tiga) kabupaten. Perwakilan Pemerintah Daerah sasaran program dan para pihak di Kementerian Pendidikan; perwakilan KemenPAN/RB; Ombudsman RI juga hadir dalam acara peluncuran program ini. Sebelum acara launching ini, dilaksanakan Edu-Talk Vlog antara Mr. H.E. Vincent Guérend (EU Ambassador to Indonesia and ASEAN) dengan Reza Rahadian (Duta Persahabatan YAPPIKA-ActionAid). Edu-Talk Vlog ini membahas mengenai situasi terkini dan dukungan EU untuk Indonesia melalui YAPPIKA-ActionAid.

Kegiatan ini juga dihelat *talkshow* dengan narasumber Fransisca Fitri (Direktur YAPPIKA-ActionAid); Meuthia Gani (Ketua Pembina YAPPIKA-ActionAid); Mr. H.E. Vincent Guérend (EU Ambassador to Indonesia and ASEAN) dan Bapak Thamrin Kasman (Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud), yang memaparkan mengenai situasi Pendidikan di Indonesia dan upaya-upaya kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut.

Kata Pengantar

Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid

Sejak 2018 hingga akhir 2021 YAPPIKA-ActionAid mengelola Program *Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality Education in Indonesia* atau disingkat menjadi Pro-InQluEd, yang didanai oleh European Union (EU). Dalam program ini YAPPIKA-ActionAid bermitra dengan 3 (tiga) organisasi, yaitu Lembaga Gemawan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Perkumpulan SOLUD di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Yayasan Bahtera di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Selama 4 (empat) tahun program ini berjalan telah menghasilkan berbagai capaian utama, diantaranya adalah upaya advokasi yang dilakukan oleh komunitas sekolah, dan jaringan CSO di tiga daerah membuahkan hasil dengan diperolehnya dana bantuan perbaikan infrastruktur sekolah, yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta CSR perusahaan nasional dan lokal.

Program telah berhasil memperkuat kapasitas komunitas sekolah dalam mempraktikkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran. Program juga berhasil mendorong seluruh sekolah dampingan (30 sekolah) untuk mempublikasikan Dokumen Anggaran Sekolah (RKAS) melalui papan informasi dan buku saku RKAS untuk diberikan kepada orang tua siswa. Anggota komunitas sekolah telah meningkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pelayanan publik, advokasi kebijakan dan analisis anggaran pemerintah. Dalam melakukan advokasi kebijakan, komunitas sekolah telah melengkapi dirinya dengan usulan kebijakan berbasis bukti, sehingga ketika melakukan dialog dengan pemerintah memiliki basis argumentasi yang kuat. Meningkatnya kapasitas komunitas sekolah dalam advokasi kebijakan merupakan faktor utama keberhasilan mereka dalam mengakses alokasi dana bantuan perbaikan infrastruktur sekolah. Komunitas

sekolah juga telah menghasilkan berbagai inisiatif dan inovasi dalam keberlanjutan komunitas sekolah, seperti inisiatif dalam mengembangkan pangan lokal, usaha kecil yang dikelola oleh komunitas khususnya para perempuan, serta inisiatif dalam memperbaiki dan menjaga sekolah, seperti pembuatan pagar dan lapangan olah raga yang dilakukan bersama oleh para anggota komunitas.

Buku ini merangkum sebagian rekaman atas keberhasilan-keberhasilan tersebut. Buku ini diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat program serta seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Kami berharap buku ini menjadi sebagai sebuah penghargaan dan inspirasi bagi pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat bertransformasi menjadi lebih baik, lebih tangguh, lebih berkualitas di masa depan.

Salam Hormat,

Fransisca Fitri

Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid

Daftar Isi

Daftar Isi

Tentang Program Pro-InQlued	iii
Pengantar	iv
Berbagi Peran, Mendorong Ruang Nyaman Menuntut Ilmu	1
Membuka Tabir Transparansi Anggaran Sekolah	10
Mefungsikan Lagi Komite Sekolah	14
Sumbangsih Tulus, Merajut Mimpi Anak Negeri	17
Meningkatnya Kehadiran Siswa Atas Intervensi Komunitas Sekolah	24
Tekad Kuat Perempuan Pendidikan Penggerak Desa.....	34

Berbagi Peran, Mendorong Ruang Nyaman Menuntut Ilmu

Kisah Keberhasilan Advokasi SDN 15 Seburing Gersik,
Kabupaten Sambas

Oleh: Aseanty Widaningsih Pahlevi



Foto 1. SDN 15 Seburing Gersik, Sambas setelah selesai diperbaiki (Foto: Pahlevi, Oktober 2021)

TEGUH, siswa kelas 6 SDN 15 Seburing Gersik, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, dengan lugas mengungkapkan cita-citanya sebagai tentara. “Saya ingin melindungi negara

Indonesia, Merdeka!” cetusnya. Temannya, Hidayat, kelas 5, ingin menjadi astronot agar dapat melihat bumi dari bulan. Herliyanti, teman sekelasnya, ingin menjadi pilot agar dapat mengunjungi berbagai tempat di penjuru dunia. Ibnu dan Sri Wulan, tergerak untuk menjadi guru, karena ingin mencerdaskan bangsa.

Tingginya cita-cita mereka tak berbanding lurus dengan kondisi ruangan tempat mereka belajar. Lantai papan telah rusak,

menyisakan lubang. Murid bisa melihat ayam atau kambing yang masuk ke kolong bangunan sekolah. Bangunan sekolah memang disesuaikan dengan kondisi geografis yang kerap acap karena pasang surut air sungai.

Achmad Fahrozi, tergelitik dengan situasi yang dialami Teguh dan teman-temannya. Sebuah video yang diunggah akun youtube Komunitas Sekolah, menjadi sumber informasinya. Ozy, sapaan akrabnya, merasa melihat hal ini merupakan hal yang jamak. Sebuah tantangan baginya untuk mengangkat isu agar menggugah banyak pihak untuk mulai membenahi hal ini. “Saya ingin berita yang membawa dampak, bukan saja memaparkan kondisi, tapi mendorong banyak pihak untuk bergerak,” katanya.

Ozy, yang cukup senior berasal dari Pontianak Post. Dia berpendapat bahwa advokasi untuk mendorong para pihak bergerak tidak bisa dilakukan sendirian. Berita yang mempunyai daya gebrak atau pengaruh, memerlukan kolaborasi dengan teman-teman jurnalis yang bekerja di media lain. “Harus kompak. Ego untuk membuat berita eksklusif untuk kepentingan perusahaan media sendiri harus ditekan. Kita kan bekerja untuk publik,” tukas Ozy.

Banyak tantangan yang dihadapi, diantaranya adalah ketersediaan data dan sumber daya. Namun, hal ini lagi-lagi tidak menjadikan niatnya surut. Informasi dari media sosial cukup membantu meringankan beban kerja jurnalis di daerah yang mempunyai tanggung jawab menyuguhkan berita tidak hanya di isu pendidikan saja.

Nurhadi, pewarta dari Suara Pemred, menambahkan hal lain. “Kabupaten Sambas wilayahnya sangat luas, letak geografinya pun cukup sulit untuk ditempuh,” ujarnya. Isu pendidikan justru berada di daerah yang terpencil, utamanya soal kondisi sekolah yang rusak.

Dia bilang, bertemu dengan narasumber langsung di lapangan memerlukan upaya khusus agar berita menjadi lebih hidup. “Sumber akan sangat terbuka, saat kita menemuinya secara langsung, meskipun kadang jauh, daya dorong tersebut lebih didapat saat kita bisa mendeskripsikan dengan baik, bagaimana berat juang para narasumber pendidikan ini, dengan cara hadir ditengah-tengah apa yang mereka alami,” ujarnya.

Tantangan lainnya adalah upaya untuk membedah anggaran pendidikan di Kabupaten Sambas. “Proses ini tak banyak yang bisa kita harapkan, kalau secara anggaran semua sudah diatur timeline oleh pemerintah, jika memang belum gilirannya, maka sulit untuk disentuh,” tukasnya.

Nurhadi menambahkan, perlu trik khusus untuk membuat para pihak ‘bergerak’. Komunikasi secara personal dengan pihak legislative pun menjadi salah satu kunci isu terfokus dan mendapat dukungan banyak pihak. “Kita bisa sedikit lega karena pihak legislatif (DPRD KAB) cukup tinggi atensi dan responsif terkait isu pendidikan, ditambah dengan kolaborasi media, ini cukup sering dilakukan,” ujarnya.

Secara terpisah, Muhammad Wawan Gunawan, jurnalis lainnya yang bertugas di Kabupaten Sambas, menyatakan, jaringan media Tribun News, cukup membantu untuk mengangkat isu ini menjadi lebih banyak diketahui publik. “Terlebih jika mempunyai foto-foto yang dramatis, bantuan media sosial ikut memberikan pengaruh terhadap isu ini,” katanya.

Diskusi di jaringan teman-teman media setempat pun memberikan penguatan terhadap isu yang dibangun. Tukar menukar pemikiran memberikan perspektif baru mengenai isu ini. Semangat untuk menulis isu tersebut semakin terpacu ketika perkembangan menuju arah perbaikan. “Atensi yang

diberikan berbagai pihak menuju arah perbaikan, memberikan kepuasan tersendiri,” ujarnya.

Di sisi lain anggota Komisi IV DPRD Sambas, menyambut tabuhan gendang para wartawan. “Saat itu kita langsung mengadakan kunjungan langsung. Untuk melakukan verifikasi dari hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Gemawan,” ujar Anwari, ketua Komisi IV DPRD Sambas.

Tidak hanya SDN 15 Seburing Gersik yang disambangi, beberapa sekolah juga mendapatkan atensi khusus. Setelah kunjungan kerja itu, legislator ini pun menggagas rapat kerja dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, untuk membahas perbaikan bangunan sekolah SD.

Dia mengakui, data yang diberikan Lembaga Gemawan cukup akurat. Tetapi, ada perbedaan indikator dari pemerintah terkait klasifikasi kerusakan sekolah. “Ada kategori ringan hingga berat. Hal ini yang berbeda, tetapi menurut saya yang paling mendasar bahwa kerusakan itu ada,” katanya.

Dia mencontohkan pula di SDN 1 Tebas, yang dua ruangan kelasnya bocor serta langit-langitnya bocor. Jika hujan turun anak-anak yang tengah belajar kebasahan. Tak hanya itu, Anwari juga menyoroti beberapa masalah umum yang ditemui di SD yang didata mengalami kerusakan.

Halaman sekolah yang becek, kerap terkena banjir, serta tidak mempunyai pagar dan sanitasi yang baik adalah hal yang paling umum. Di SDN 1 Tebas sendiri, dari pengakuan aparatur sekolah, kerusakan sudah dilaporkan sejak tahun 2017 namun belum kunjung diperbaharui.

Wakil Ketua DPRD Sambas, Suriadi menambahkan, jalan-jalan penghubung menuju sekolah harus juga mendapat perhatian pemerintah untuk ditingkatkan. “Banyak jalan yang masih rusak, sehingga sulit untuk diakses kendaraan. Kondisi

ini juga menyulitkan distribusi bahan bangunan jika sekolah akan diperbaiki,” tukasnya.

Komisi IV juga mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sambas melakukan pemutakhiran data terkait permasalahan sekolah. Pendataan bisa mengacu pada riset yang sudah ada, atau juga melakukan riset mandiri.

Riset dilakukan Lembaga Gemawan, bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat. Riset ini termasuk dalam Program Promosi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd). Program ini diinsiasi YAPPIKA-ActionAid, sebuah organisasi nirlaba yang telah berkiprah selama 30 tahun di Indonesia yang bekerja untuk advokasi kebijakan dan perbaikan layanan publik di Indonesia.

Di Kabupaten Sambas, YAPPIKA-ActionAid bekerja sama dengan Lembaga Gemawan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan dasar di Indonesia, sejalan dengan pencapaian indikator #4 dari Sustainable Development Goals (SDGs) melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik.

Sementara tujuan khusus program ini adalah untuk memperkuat dan meningkatnya kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dengan Pemerintah Daerah untuk secara efektif mengimplementasikan inisiatif untuk terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas. Selain di Sambas, Kalimantan Barat, program ini juga berjalan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Secara keseluruhan, program Pro-InQluEd diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 151.100 anak usia sekolah dasar dari kelompok miskin dan terpinggirkan, termasuk anak penyandang disabilitas dan putus sekolah melalui penguatan

tata kelola dan akuntabilitas bidang pendidikan di 3 kabupaten tersebut.

Hasil riset Program ProInQluEd tentang sekolah rusak, menunjukan Kabupaten Sambas kekurangan 164 ruang kelas. Dari riset tersebut juga didapati 340 ruangan sekolah dasar dalam keadaan kelas yang rusak berat. Hasil rekomendasi program, di tahun 2020 terdapat 10 ruang kelas baru dan 21 rehab ruang kelas di tingkat sekolah dasar. “Untuk itulah strategi dan rekomendasi praktis yang telah disusun dalam roadmap penyelesaian sekolah rusak perlu didesiminasikan ke beberapa pihak terkait,” ujar Nuryani, distric coordinator program.

Lembaga Gemawan juga membantu penyusunan roadmap Penyelesaian Sekolah Rusak Tingkat SD di Kabupaten Sambas. Penyusunan roadmap penyelesaian sekolah rusak ini sendiri dilatari fakta tingginya angka sekolah rusak di lapangan, yang tidak berbanding lurus dengan laju pembangunan atau perbaikan oleh pemerintah daerah.

Belajar Nyaman

Kondisi SDN 15 Seburing Gersik yang diperlihatkan dalam konten Youtube Komunitas Sekolah, cukup banyak menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya masyarakat Kabupaten Sambas, namun juga skala nasional.

Ruslan, kepala sekolah, mengatakan, sekolah tersebut belum pernah di rehab sejak berdiri tahun 1981. Saat ini sekolah telah mempunyai 79 siswa. “Jumlah yang cukup banyak dibanding tahun sebelumnya. Terjadinya penambahan karena ada sistem zonasi sekolah,” ujarnya.

Para siswa diajar oleh delapan orang guru. Ruslan pun ikut mengajar agar mencukupi. Pasalnya selama pandemi, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan rombongan belajar. Guru-guru harus mendatangi rumah-rumah siswa, yang belajar secara berkelompok.



Foto 2. Ruang kelas SDN 15 Seburing Gersik setelah diperbaiki (Foto: Fahlevi, Oktober 2021)

Kini sekolah tersebut sudah terlihat 'moncreng'. Walau menggunakan pondasi awal, namun ruangan belajarnya telah nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Siswa-siswa pun mendapatkan bantuan meja kursi dari pemerintah.

Tak hanya itu, dengan bantuan Lembaga Gemawan, SDN 15 Seburing mendapatkan toilet baru yang memenuhi standar kesehatan. "Teman-teman Gemawan membuka donasi *online*," ujarnya. Pembangunan toilet tersebut menjadikan pijakan awal untuk mendorong pemerintah bergerak.

Di lokasi lain, seperti SDN 19 Medang siswa harus belajar di pelataran sekolah karena kekurangan ruang kelas. Nusipah, Kepala Sekolah SDN 19 Medang, mengatakan, penambahan ruang kelas sangat dibutuhkan untuk

"Karena ruangan hanya empat dan sudah penuh, murid yang lain belajar di pelataran dan di rumah pesuruh sekolah," tambah Nusipah. Keinginan siswa untuk belajar sangat tinggi

sehingga Nusipah bertekad keras untuk memenuhi hak anak tersebut.

Laili Khairnur, direktur Lembaga Gemawan mengatakan, *collaborative governance*, menjadi inisiatif yang cukup bisa diandalkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemakmuran bangsa ini. Dia menekankan pemerintah tidak bekerja sendiri namun harus dapat menggerakkan elemen-elemen masyarakat lainnya untuk menuju tercapainya pembangunan.

“Salah satu keberhasilan program ini adalah terbentuknya komunitas sekolah,” katanya. Komunitas sekolah diharapkan dapat menjadi mitra kerja Gemawan dan akan terus bersinergi dengan isu yang ada dalam aktivitas masyarakat sipil di Kalimantan Barat.

Laili juga berharap agar komunitas sekolah yang telah terbentuk dapat terus aktif dalam melakukan pengawasan dan advokasi bersama dalam isu pendidikan. Selama program telah terbentuk 10 komunitas sekolah di 10 sekolah yang dipayungi Forum Peduli Pendidikan di Kabupaten Sambas.

Nuryanti, *District Coordinator* Pro-InQluEd, mengatakan, banyak pihak yang masih ingin agar program serupa dapat terus ada dan berdampingan dengan pemerintah dan masyarakat. Terlebih hasil dari kolaborasi tersebut mewujudkan kolaborasi yang saling mengisi. “Setelah mendapatkan ruangan baru, saya melihat semangat belajar yang luar biasa dari anak-anak. Mereka juga cukup cerdas untuk dapat mengutarakan pendapatnya,” ujar Yani.

Selang beberapa bulan setelah pemberitaan yang marak di media massa, sembilan dari sepuluh SD di sepuluh desa berhasil diperbaiki, termasuk SDN 16 Seburing Gersik. Kini, Teguh, Hidayat, Herliyanti, Ibnu dan Sri Wulan, dapat dengan nyaman mewujudkan cita-citanya dengan mengasah pengetahuan dasar di sekolah yang nyaman.

Membuka Tabir Transparansi Anggaran Sekolah

Kisah Keberhasilan Komunitas Sekolah SDN Rajaka,
Kabupaten Sumba Barat

Oleh: Yakobus Ngabi Lalapraing



Foto 3. SDN Rajaka, Kabupaten Sumba Barat (Foto: Munawir, November 2019)

SD Negeri Rajaka yang berada di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu sekolah dampingan program Pro-InQluEd sejak tahun 2018. Pada tahun tersebut, dibentuklah komunitas sekolah yang terdiri dari masyarakat yang peduli pendidikan seperti orang tua siswa, tokoh masyarakat, komite sekolah, pemerintah desa dan guru. Sejak didampingi banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas salah satunya yaitu kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran sekolah atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Sebelum pendampingan, untuk penyusunan penganggaran sekolah hanya dilakukan dan diketahui oleh beberapa orang saja di sekolah bahkan tidak semua guru juga mengetahui cara menyusunnya. “Sebelum-sebelumnya kami hanya dibawakan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah disusun dan kami langsung tanda tangan saja tanpa pernah tahu proses dan sumber dananya dari mana”, demikian dituturkan bapak Markus M. Sappu selaku Ketua Komunitas Sekolah sekaligus Komite Sekolah SDN Rajaka.

Sebelum pendampingan, transparansi penggunaan dan penyusunan RKAS tidak diketahui oleh semua pihak termasuk guru, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar unsur dalam lingkup sekolah. Anggota komunitas ada yang sering terlibat dalam kegiatan, tetapi bukan pada penyusunan RKASnya hanya sebatas pada pembahasan mengenai penentuan siswa-siswi yang akan memperoleh beasiswa. Anggota komunitas juga tidak mengetahui sumber dananya dari mana.

Sejak bulan September tahun 2019, setelah pertemuan komunitas sekolah yang membahas tentang RKAS maka disepakatilah untuk membentuk tim yang terdiri dari pihak sekolah dan masyarakat untuk mulai menyusun perencanaan dan penganggaran sekolah serta mempublikasikan untuk dapat diakses oleh masyarakat yang ada di Desa Rajaka maupun yang berada di sekitar desa, komunitas sekolah semakin paham tentang tata cara penyusunan perencanaan dan penganggaran di sekolah karena didiskusikan mulai dari awal tentang rincian kegiatan yang ada. Bahkan, anggota

komunitas sekolah yang terlibat sebagai tim penyusun memperoleh honor penyusunan RKAS.



Foto 4. Proses penyusunan RKAS yang dilakukan bersama antara sekolah komite sekolah dan komunitas sekolah (Foto: Abi, Maret 2020)

Anggaran sekolah yang sebelumnya hanya diketahui oleh kepala sekolah, sekarang sudah disusun secara transparan dan melibatkan semua unsur dari sekolah dan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sekolah dalam penggunaan dana sekolah. Hal baik ini perlu untuk terus dilanjutkan dan ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya.



Foto 5. Baliho Transparansi Anggaran Sekolah di SDN Rajaka (Foto: Abi, Oktober 2021)

Memfungsikan Kembali Komite Sekolah

Kisah Keberhasilan Komunitas Sekolah SDN Kadoku,
Kabupaten Sumba Barat

Oleh: Yakobus Ngabi Lalapraing

SDN Kadoku merupakan salah satu sekolah dari 10 sekolah dasar yang didampingi oleh Yayasan Bahtera kerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid dukungan dana dari Uni Eropa. Sekolah ini terletak di Desa Weimangoma, Kecamatan Lamboya, Kab. Sumba Barat. Sebagai salah satu sekolah dampingan, telah ada komite sekolah yang dibentuk oleh sekolah bersama masyarakat. Keberadaan komite sangat penting untuk turut mengawasi aktivitas dan keadaan sekolah serta mendukung pendidikan yang lebih baik di sekolah.

Komite di sekolah ini telah diperbaharui pada bulan Mei 2021 dimana 3 orang anggota komunitas terlibat dalam kepengurusan komite yaitu ketua bapak Eliaf Higa Lewa, wakil ketua bapak Agustinus Heingu Garra dan sekretaris mama Doiki Radi. Bapak Eliaf merupakan anggota komunitas, bapak Agustinus merupakan ketua komunitas dan Mama Doiki merupakan perwakilan orang tua anak disabilitas.

Bapak Eliaf merupakan mantan ketua yang terpilih lagi saat pembaharuan, sedangkan bapak Agustinus dan mama Doiki merupakan anggota komite yang baru. Komite yang ada saat ini lebih aktif bila dibandingkan dengan komite yang lama.

Sebelum didampingi, komite sekolah tidak memahami seutuhnya soal peran dan fungsi mereka sebagai komite sekolah. Komite tidak aktif dalam memantau perkembangan sekolah, walaupun aktif hanya ketua komite saja. Komite hanya tau bahwa mereka adalah komite tetapi tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya. Komite cenderung acuh tak acuh terhadap situasi sekolah.



Foto 6. Musyawarah Pemilihan Komite Sekolah SDN Kadoku (Foto: Marcel, Mei 2021)

Perbandingan yang signifikan terjadi saat mulai didampingi. Komite sekolah bersama komunitas mulai aktif dalam memantau perkembangan sekolah seperti memperhatikan kebersihan, kerajinan anak-anak bersekolah, soal Kartu Indonesia Pintar semakin jelas, dan kepedulian orang tua untuk menyekolahkan anak semakin meningkat. Perubahan-perubahan ini terjadi karena adanya peningkatan kapasitas kepada komite sekolah melalui pertemuan komunitas di sekolah dan di tingkat kabupaten.

“Setiap dua kali seminggu, kami akan melakukan kunjungan ke sekolah untuk memastikan kehadiran anak. Jika ada anak yang tidak hadir maka komite akan melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut dan menanyakan alasan ketidakhadiran anak tersebut ke sekolah. Hal ini kami lakukan karena kami peduli dengan anak-anak dan sekolah kami. Kami juga ingin mengurangi beban kerja guru” demikian diungkapkan bapak Eliaf.

Saat ini, komite selalu mengingatkan orang tua baik pada saat kunjungan maupun saat rapat orang tua di sekolah untuk menyekolahkan anak dan mendampingi anak saat belajar di rumah terutama belajar baca, tulis dan menghitung. Komite juga melakukan kerja-kerja swadaya berupa menyumbangkan material untuk pengerjaan pagar sekolah demi kenyamanan anak saat belajar dan juga melakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa yang tidak pergi ke sekolah. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan saat didampingi oleh Yayasan Bahtera saja, tetapi akan terus dilakukan bahkan ketika tidak didampiri lagi demi pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di desa Weimangoma.

Sumbangsih Tulus, Merajut Mimpi Anak Negeri

Kisah Keberhasilan Perbaikan Implementasi KIP di Sambas

Oleh: Aseanty Widaningsih Pahlevi



Foto 7. Papan Informasi Sekolah (Foto: Pahlevi, Oktober 2021)

“KOMUNITAS sekolah ini harus tetap jalan setelah program berakhir. Sangat pendek waktunya untuk membenahi masalah pendidikan di desa,” ujar Didi Prianata (24), kepala Dusun Palai, Desa Sempalai Sebedang, Sambas. Desanya bisa dibilang tak terpencil, terletak di akses jalan menuju Kabupaten Sambas. Hanya empat jam perjalanan dari Kota Pontianak, ibukota Kalimantan Barat.

Didip, panggilan akrabnya, baru bergabung setelah program berjalan. Jejaring ini sangat strategis untuk membantu warga desa dapat mengakses pendidikan serta bantuan pendidikan yang merupakan hak dasar anak. Menemukan komunitas ini, Didip langsung berkomitmen untuk mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam program. Banyak hal yang terekam olehnya, yang dapat dibenahi melalui komunitas relawan ini.

“Ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak tepat sasaran, ada pula yang belum bisa mengakses KIP karena kurangnya pengetahuan, atau belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujarnya.

Pria yang berlatar pendidikan guru olahraga ini juga bekerja sebagai operator sekolah di SDN 3 Sempalai Sebedang. Pekerjaan ini membuatnya paham alur pendaftaran warga dan mendekatkan akses siswa dengan bantuan pemerintah tersebut. Di desa, terdapat 18 anak yang menerima KIP, namun masih ada 12 siswa yang memenuhi syarat mendapatkan KIP namun diluar DTKS.

Dia pun mendata, saat ini sudah 14 siswa yang memanfaatkan KIP hingga bangku sekolah menengah atas, dan lima siswa yang mendapatkan KIP kuliah. Setelah program ini selesai, Didip menginisiasi ke pihak desa, untuk membuat komunitas sekolah menjadi salah satu pilar pembangunan pendidikan di tingkat desa. Menurut Didip, komunitas sekolah mempunyai fungsi strategis untuk mengurai masalah pendidikan di tempatnya.

“Tingkat putus sekolah masih cukup tinggi. Terutama dari SMP, banyak yang memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga,” jelasnya. Dia mengusulkan agar desa bisa memfasilitasi Komunitas Sekolah dengan membuat surat keputusan desa sehingga dapat mengakses anggaran desa. Kekurangan lapangan pekerjaan membuat para pemuda di desa mempunyai keinginan untuk mencari pekerjaan di luar desa untuk memperbaiki perekonomian keluarga.

Terlebih, untuk beberapa keluarga, anak-anak mereka terbiasa mencari tambahan uang dengan bekerja setelah sekolah. Ada yang mencari katak untuk pakan ikan, atau membantu orang tuanya di perkebunan. Beberapa mulai beranggapan bahwa menamatkan pendidikan tidak terlalu penting. Namun, Didip

berharap dia dan komunitas dapat mengubah pandangan tersebut.

Dia tertekad agar warga yang belum menamatkan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di desa. “Saya berharap pada tahun 2023, minimal warga lulus sekolah menengah pertama,” katanya. Didip sendiri tak segan menjemput bola, agar anak-anak di desanya mendapatkan akses terhadap pendidikan dasar.

Pada beberapa kejadian, Didip mendapati orangtua siswa mengabaikan pesan singkat dari pemerintah untuk mengakses KIP. Ada pula yang bertanya, namun tidak mengetahui bagaimana agar KIP tersebut dapat diaktifkan. Ada lagi kasus, di mana warga yang dikategorikan tidak mampu, belum terdata di dalam sistem, sehingga tidak mendapatkan bantuan. Kedepannya, Didip ingin pendidikan dasar pun dapat dicapai oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus di desanya. Tahun depan, dia akan memulai sekolah inklusi di rumahnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. “Paling tidak mereka dapat terapi pembelajaran yang tepat, sehingga mampu mandiri,” katanya.

Inisiasi masyarakat untuk memajukan pendidikan di daerahnya sangat perlu mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Termasuk upaya membentuk lembaga yang menjadi jembatan informasi bagi masyarakat setempat terhadap akses pendidikan. “Kita membantu masyarakat untuk bisa memutakhirkan data serta mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat,” tukas Muslimah, ketua Forum Peduli Pendidikan.

Majunya pendidikan di suatu daerah, kata dia, serta merta akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerahnya. Kabupaten Sambas merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Jumlah korporasi yang berada di Sambas pun tidak sedikit. Tak hanya itu, Sambas merupakan salah satu

daerah penghasil padi terbesar di Kalimantan Barat. “Sayang jika potensi ini hanya menjadikan masyarakat Sambas sebagai penonton saja. Maka, warga harus mempunyai pendidikan yang mumpuni agar bisa menempati jabatan formal, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.

Forum ini pun bertujuan untuk memastikan anggaran pendidikan mendapatkan pemenuhan kuota dan tepat sasaran dengan bersinergi bersama pemerintah. Tidak hanya sarana dan prasarana belajar mengajar, tetapi juga layanan penunjang lainnya dapat dipastikan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas.

“Utamanya bagaimana program pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar ini menjadi salah satu solusi agar masyarakat mendapatkan akses pendidikan dasar,” katanya. Untuk itu, kelengkapan data Pokok Pendidikan (Dapodik) di sekolah harus terus dimutakhirkan. Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

Di sisi lain, peran perangkat sekolah juga sangat penting untuk mendekatkan akses pendidikan bagi anak di suatu wilayah. Kepala sekolah yang ambil peran untuk melengkapi pendataan, serta bisa menjalin kerja sama dengan perangkat desa, dapat menghidupkan jalur komunikasi serta memperpendek birokrasi. “Kita harus benar-benar mengenal siswa di sekolah, memahami hambatan kegiatan belajar mereka, termasuk pula menambah pengetahuan diri,” kata Kepala Sekolah SDN 03 Dalam Kaum, Ermy Sumiati.

Ermy tak segan mendatangi siswanya yang tidak bersekolah, untuk melihat langsung keadaannya. “Ada yang membantu orangtua bekerja, ada pula yang jauh rumahnya dengan akses jalan yang kurang bagus,” kata Ermy. Dia bahkan pernah

menggalang dana bersama para guru, untuk membelikan sepeda bekas, agar muridnya tetap bersekolah.

Bahkan, dia menerima siswa yang berkebutuhan khusus di sekolahnya, dan mengajak siswa di kelas yang lain untuk menerima perbedaan serta membantu anak tersebut di kelas. Ketika kekurangan guru pendamping anak tersebut, Ermy pun memberikan bekal agar orangtua murid bisa ikut di dalam kelas untuk membantu anaknya belajar.

Namun, kata dia, kemauan dan kerja keras perangkat sekolah tidak lah cukup. Perlu data pendukung yang lengkap agar sekolah dapat mempersiapkan program belajar mengajar yang baik. Ermy menambahkan, peran operator sekolah pun tidak bisa dianggap sepele.

Pasalnya, validitas data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sangat berhubungan dengan penyaluran dana dari pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tidak hanya data siswa, tetapi juga data para guru dan sekolah itu sendiri. Tentu saja salah satunya untuk mendekatkan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Termasuk siswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). “KIP diberikan sebagai penanda/identitas penerima bantuan pendidikan dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Kartu ini memberi jaminan dan kepastian anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Satu anak penerima bantuan pendidikan PIP hanya berhak mendapatkan satu KIP,” jelasnya.

Operator sekolah adalah ujung tombak data pendidikan pada tiap sekolah, termasuk pula sarana prasarana, dana bantuan operasional sekolah, sertifikasi, atau kepangkatan guru. “Kita klasifikasikan dalam file keras maupun lunak,” ujarnya. Benar saja, di ruangan sekolah tampak lemari yang memuat map hitam dengan label putih, bertuliskan keterangan-keterangan

isi file tersebut. Ada Data Murid, Data Guru, serta Data sekolah. Beberapa map lainnya berisi hal-hal yang lebih spesifik.

Kata Ermy, operator sekolahnya pun kerap mengikuti bimbingan teknis agar dapat mengetahui perkembangan terkini mengenai program serta pemutakhiran data-data sekolah. Aplikasi khusus untuk menambahkan data-data memerlukan kepiawaian dan ketelitian dari operator sekolah. Makin lengkap data yang dimiliki sekolah, makin besar kemungkinan semua program pemerintah dapat diserap dengan baik. Untuk itu, kata Ermy, peranan pengelola Dapodik, tidak bisa dikesampingkan.

Nuryani, dictric coordinator program Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd), memberikan catatan khusus mengenai peran serta perangkat desa dan sekolah untuk para siswa penerima KIP.

Program Pro-InQluEd sendiri merupakan program yang dijalankan Lembaga Gemawan bekerjasama dengan YAPPIKA-Action Aid (YAA). Yappika Action Aid menjadi lead organisasi pengelolaan program yang didanai oleh European Union (EU) dalam program ini. "Ibu Ermy dan Pak Didip merupakan tokoh yang berperan aktif untuk membantu siswa penerima KIP," katanya.

Ermy menjalankan perannya dengan aktif melakukan pemantauan data siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di aplikasi SiPintar. Sedangkan Didip, ikut berperan memberitahukan kepada kepada siswa penerima dan membantu siswa atau orangtuanya dalam melakukan aktivasi rekening siswa penerima PIP.

Program Pro-InQluEd bertujuan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik pada sektor pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan dengan peningkatan partisipasi masyarakat sipil pada proses pembangunan publik, sehingga institusi pemerintah dapat berjalan dengan lebih

transparan dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan pencapaian indikator 4 dari Sustainable Development Goals (SDGs), yakni peningkatan akses untuk mencapai pendidikan yang berkualitas.

Nuryani berharap, berakhirnya program tidak menghentikan dua sosok, dan banyak sosok lainnya di Kabupaten Sambas, untuk dapat berbuat lebih banyak dalam tata kelola sektor pendidikan. Apa yang dilakukan Ermy dan Didip tidak bisa dipandang kecil. Dia menyakini, segala sesuatu berawal dari langkah kecil dan dilakukan secara konsisten akan menjadi langkah besar dan membawa perubahan. Perubahan sektor pendidikan Kabupaten Sambas yang lebih maju dan unggul.

Meningkatnya Kehadiran Siswa atas Intervensi Komunitas Sekolah

Kisah Keberhasilan Mengembalikan Anak Putus Sekolah di
Kabupaten Bima
Oleh: Fachrunnas

Sejumlah siswa berseragam olahraga dan Pramuka tampak serius mendengarkan arahan dari guru pembina. Mereka berbagi tugas sebagai pelaksana upacara bendera untuk hari Senin. Ada yang bertugas sebagai pengibar bendera, ada juga bertugas sebagai pembaca teks Undang-Undang 1945, pembawa teks Pancasila serta bertugas sebagai peserta upacara.

Latihan upacara bendera mereka gelar di bawah pohon mangga di halaman sekolah berukuran lebih kurang 50x50 meter. Mereka tetap bersemangat bersekolah meskipun di tengah pandemi Covid-19. Sekolah ini terletak 100 meter dari mulut gang di Jalan Lintas Bima-Sumbawa, Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Pada bagian depan halaman tertulis papan nama sekolah, SDN Inpres Rasanggaro.

Pada salah satu ruangan di sekolah ini, terpampang banner yang berisi beberapa tulisan dan sejumlah logo, di antaranya logo SOLUD dan YAPPIKA-ActionAid. SDN Inpres Rasanggaro Kecamatan Bolo adalah salah satu dari 10 sekolah dasar di Kabupaten Bima yang menerima pendampingan dari Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD), Mitra Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA-Action Aid) dengan Uni Eropa, yang melaksanakan Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd).

Kepala SDN Inpres Rasanggaro, Ilyas H Jamaluddin S.Pd mengungkapkan, kehadiran siswa di sekolah setempat dua

tahun terakhir meningkat kendati di tengah pandemi Covid-19. Bahkan nyaris mencapai 100 persen. “Alhamdulillah tingkat kehadiran siswa meningkat. Rata-rata hadir ke sekolah, karena jika ada anak meninggalkan sekolah, guru kami bersama komite sekolah langsung melakukan berbagai upaya,” ujar Ilyas saat ditemui di SDN Inpres Rasanggaro, Sabtu (16/10/2021) lalu.



Foto 8. Aktivitas KBM di SDN Rasanggaro, Kabupaten Bima (Foto: Fachrunnas, Oktober 2021)

Selain itu, tidak ada lagi siswa putus sekolah karena mengikuti orang tua saat musim panen di luar daerah seperti di Kabupaten Sumbawa. Semenjak pendampingan oleh SOLUD, SDN Inpres Rasanggaro membangun komunikasi intens dengan komunitas sekolah, memastikan siswa tetap masuk saat kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah berlangsung.

“Kalau yang ke Sumbawa ada 2-3 siswa, mereka meninggalkan sekolah paling lama 15 hari. Orang tua beralasan takut meninggalkan anaknya sendirian karena tidak

ada mengurus saat hendak berangkat sekolah. Tapi begitu ada siswa yang tidak masuk sekolah, kami langsung bersurat ke orang tua murid atau keluarganya dan melakukan kunjungan rumah,” ungkap Ilyas.

Ilyas mengaku, beberapa tahun lalu tingkat kehadiran siswa tidak sama seperti sekarang. Sekolah melewati berbagai perjuangan mendorong kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dasar bagi anak. Selain kunjungan ke rumah siswa, sekolah juga rutin membangun komunikasi dengan komunitas sekolah yang membantu sosialisasi. Pelibatan komunitas sekolah dilakukan pihaknya setelah mendapatkan pendampingan dari SOLUD.

Jika dulu tingkat kehadiran siswa terutama pada musim tanam hanya 70 persen dari total siswa, kini nyaris mencapai 100 persen.

“Dulu ada salah satu siswa yang dibawa oleh orang tuanya 3-4 bulan, sampai ujian sekolah dia tidak ikut ujian. Walaupun upaya kami kirim keluarganya untuk jemput anak tersebut dan berkomunikasi via telpon, tapi orang tuanya yang bertani di Sumbawa memilih anaknya nggak ikut ujian. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi yang seperti itu,” ujar Ilyas.

Ilyas juga bersyukur, berkat intervensi komunitas sekolah dan pendampingan SOLUD, melek membaca di sekolah setempat juga meningkat. Tidak ada satupun siswa SDN Inpres Rasanggara yang bermasalah dengan keaksaraan fungsional, gagap membaca atau buta huruf.

“Untuk sekarang nggak ada, kecuali tahun lalu ada satu orang yang gagap membaca, termasuk disabilitas. Ibu Chandra (SOLUD) melihat langsung itu. Alhamdulillah lewat bimbingan bapak-ibu gurunya, walaupun mereka mengeja, tapi sudah mengarah ke bisa membaca,” ujarnya.

Tak hanya SDN Inpres Rasanggaro yang merasakan efek positif intervensi komunitas sekolah, SDN Sanolo Kecamatan Bolo juga menyadari perubahan yang sama setelah adanya pendampingan oleh SOLUD. Bahkan tak tanggung-tanggung, tiga tahun lalu tercatat 25 siswa sekolah setempat memilih keluar sekolah karena berbagai alasan, terutama karena membantu orang tua mencari nafkah.

“Akhir tahun 2018 ke bawah ada 20 lebih siswa yang *drop out*, pasang surut, kadang setahun hilang dan balik lagi, sehingga merepotkan operator (sekolah) saya. Keluar masuk data Dapodik, ditambah lagi pemeriksaan oleh Inspektorat yang bilang nambah-nambah siswa,” ujar Kepala SDN Sanolo, Muhammad Ali.

“Betul juga sih, namanya ada, tapi orangnya tidak ada. Tapi kita ini perang nurani, kita mau keluarkan siapa tahu besok datang lagi. Itu risiko kita di sini,” sambung Ali.

Ali tak bisa membayangkan bagaimana jadinya nasib siswa drop out di SDN Sanolo jika tak ada pendampingan SOLUD. Mitra YAPPIKA-ActionAid tersebut berhasil mengarahkan pihaknya agar melibatkan berbagai unsur dalam menyelesaikan masalah kehadiran siswa.

“Cara kita memanfaatkan komite, tokoh masyarakat dan pemerintah desa, itu kita nggak pernah berpikir ke situ. Namun berkat dukungan SOLUD akhirnya ternyata itu cara paling efektif. Setelah ada teman-teman SOLUD, semua bisa, sehingga saat ada siswa yang masih berkeliaran di kampung ketika jam sekolah, ada yang menegur. Komunitas itu juga kadang-kadang yang tegur siswa yang keliaran,” ujar mantan pendidik di SDN So Nae, Desa Kawinda Nae Kecamatan Tambora ini.

Kultur masyarakat pesisir dengan background ekonomi menengah ke bawah yang mengandalkan sektor kelautan dan menjadi buruh, awalnya menjadi kesulitan tersendiri bagi SDN

Sanolo memastikan siswa rutin mengikuti KBM setiap jam sekolah. Beberapa siswa bahkan harus dijemput di tambak garam agar masuk sekolah. Sementara sebagian siswa lain awalnya putus sekolah karena mengikuti orang tua mereka yang berladang di Sumbawa. Beberapa orang tua siswa sengaja tak menyuruh anak mereka masuk sekolah karena kecewa tak menerima dana bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP).

“Dulu PIP ada plus minusnya. Ada siswa yang sepantasnya dapat, tapi tidak ada namanya dikirim dari sana. Kecewa mereka (orang tua murid) sehingga kasi tahu anaknya nggak usah ke sekolah. Tapi sekolah memberi penjelasan dan alhamdulillah sudah plong,” ujarnya.

Menurut Ali, sejumlah perubahan yang dialami sekolah yang dipimpinnya berkat intervensi komunitas sekolah. “Itu dukungan dari teman-teman SOLUD. Kalau dukungan material dan fasilitas mungkin nggak seberapa, tapi dukungan ilmu dan cara-cara itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa berlanjut, walaupun sekadar silaturahmi dengan kita di sini,” harap dia.

Ali mengaku, hingga kini komunikasi SDN Sanolo dengan komunitas sekolah yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah desa, kepala dusun dan komite sekolah masih terjalin dengan baik. Pihaknya juga memanfaatkan berbagai kegiatan sosial masyarakat seperti rembuk keluarga (mbolo weki), mengingatkan orang tua murid agar tetap menekan anaknya agar masuk sekolah.

“Kalau SOLUD mewajibkan rapat. Sekarang sudah terbangun komunikasi dengan komunitas sekolah, terutama Kaur dan kepala dusun. Alhamdulillah, ternyata mau juga orang-orang itu, cuma selama ini nggak kita hargai, nggak kita beri pemahaman. Kita beri pemahaman, mereka yang bantu kita. Tingkat kehadiran siswa sekarang sudah nggak ada masalah,” ungkap Ali.

Secara terpisah, anggota Komunitas Sekolah Desa Sanolo, Jufrin menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan SOLUD, mitra YAPPIKA-ActionAid dalam mendorong pendidikan inklusi di desa setempat.

Menurut Jufrin, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan latar pencaharian masyarakat yang dominan pada sektor kelautan, buruh dan pertanian menjadi salah satu alasan orang tua murid memanfaatkan tenaga anaknya membantu mereka dalam memenuhi nafkah. Namun tak pelak kondisi itu mengancam masa depan kualitas SDM di Desa Sanolo.



Foto 9. Kunjungan Komunitas Sekolah SDN Sanolo ke rumah salah satu anak putus sekolah (Foto: Munawir, November 2019)

“Kami menyadari perlu peran dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa, sehingga program yang sudah berjalan sangat kami apresiasi. Komunikasi yang sudah terbangun

tentu akan kami teruskan,” ujar aparaturnya Pemerintah Desa Sanolo, Kabupaten Bima ini.

Tidak hanya dua sekolah di Kecamatan Bolo tersebut, SDN Kalaki di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima juga merasakan banyak manfaat intervensi komunitas sekolah dalam mendorong tingkat kehadiran siswa. Permasalahan utama yang dihadapi sekolah setempat berkaitan tingkat kehadiran, yaitu aktivitas siswa menggeluti profesi joki cilik, yang telah menyatu sebagai kultur masyarakat setempat, karena pemukiman warga tak jauh dari arena pacuan kuda di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

“Setelah pendampingan lebih kurang satu tahun, ada banyak perubahan, mulai dari sisi fisik sekolah seperti kekurangan WC SDN Kalaki. Dari guru-gurunya banyak ikatan yang baik dengan SOLUD dan masyarakat, seperti dilibatkannya untuk kasus siswa kami yang dimanfaatkan sebagai joki cilik,” ujar Bunaya, Wali Kelas I SDN Kalaki Kabupaten Bima.

Menurut Bunaya, pada awalnya tingkat kehadiran siswa di sekolah setempat rendah karena pengaruh sikap malas dan aktivitas siswa yang menjadi joki cilik. Namun seiring waktu dan berkat intervensi komunitas sekolah, tingkat kehadiran siswa nyaris 100 persen.

“Kalau terlibat (jadi joki cilik) masih berlanjut, bahkan sampai sekarang. Efeknya tetap ada ke siswa selama ada kegiatan melibatkan joki cilik. Kalau dihilangkan sama sekali, belum bisa. Masyarakat di sini masih menganggap sebagai mata pencaharian. Tapi berkat intervensi sekarang, persentase siswa yang tidak hadir hanya nol koma sekian dari 88 siswa,” ujar wanita yang juga menjadi operator Dapodik sekolah ini.

Dia memastikan, komunikasi SDN Kalaki dengan tokoh masyarakat, komite sekolah dan aparaturnya desa yang tergabung dalam komunitas sekolah yang digagas oleh SOLUD, mitra

YAPPIKA-ActionAid, tetap terbangun. Terutama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi sekolah. "Alhamdulillah pengaruhnya positif banyak, dari sisi fisik dan nonfisik," ujar Bunaya.

Dua sekolah di Kecamatan Ambali Kabupaten Bima juga merasakan perubahan yang sama setelah ada intervensi komunitas sekolah. Awalnya sebelum program pendampingan, tingkat kehadiran siswa di SDN Tolowata hanya 60-70 persen dari total 69 siswa. Namun secara perlahan meningkat setelah berbagai upaya bersama yang dilakukan komunitas sekolah.

"Kalau sebelumnya siswa yang hadir paling banyak 60-70 persen saja dari 69 jumlah siswa, tapi sekarang mengalami perubahan 80-95 persen,"ungkap Kepala SDN 2 Tolowata, Ramlin S.Pd saat ditemui di sekolah setempat, Senin (25/10/2021).

Ramli mengatakan, komunitas sekolah yang terbentuk melakukan berbagai upaya pendekatan untuk mendorong perubahan di sekolah, setelah mengidentifikasi berbagai persoalan di sekolah, seperti minimnya kehadiran siswa pada musim tanam dan kurangnya partisipasi orang tua dalam mendampingi dan memberikan motivasi kegiatan belajar anak.

"Dalam hal meningkatkan motivasi anak untuk hadir di sekolah, mereka melakukan pendekatan kekeluargaan dengan orang tua siswa dengan memberikan pengertian pentingnya pendidikan bagi anak, terutama di tingkat dasar," katanya.

Pada aspek lingkungan sekolah, komunitas sekolah juga mendorong guru-guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga siswa betah berada di sekolah. "Salah satunya adalah belajar sambil bermain dengan pembelajaran kontekstual,"tuturnya.

Menurut Ramlin, keberadaan komunitas sekolah cukup efektif mendorong perubahan di sekolah, kendati tidak semua

masalah sekolah mampu diselesaikan. “Akan tetapi ada perubahan yang dilakukan seperti tingkat kehadiran siswa,” ujarnya.

SDN Inpres Nipa yang berlokasi di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, juga merasakan berbagai manfaat positif kolaborasi dan partisipasi komunitas sekolah yang dibangun SOLUD. Sebelum komunitas sekolah terbentuk di sekolah setempat, siswa yang intens mengikuti KBM di sekolah hanya 30-35 siswa dari jumlah keseluruhan murid 67 orang.

Hal tersebut diungkapkan Operator Dapodik SDN Inpres Nipa, Ansahulah S.Pd. Serupa dengan berbagai sekolah lain di wilayah Kabupaten Bima, semula tingkat kehadiran siswa di sekolah ini menurun drastis saat memasuki musim tanam. Siswa tidak masuk karena mengikuti orang tua bekerja sebagai petani maupun sebagai nelayan.

Seiring intervensi komunitas sekolah, tingkat kehadiran siswa di SDN Inpres Nipa meningkat. Komunitas sekolah melakukan berbagai pendekatan kepada orang tua siswa dan sekolah. “Komunitas sekolah menekan orang tua siswa saat ada rapat sekolah dengan orang tua siswa,” ujar Ansahulah.

Perubahan tingkat kehadiran tingkat siswa mulai tampak selama musim kemarau tahun lalu. Jika sebelumnya siswa yang masuk sekolah hanya 30-35 orang, kini tingkat kehadiran siswa mencapai 85-95 persen. “Sekolah mulai ramai dan antusias belajar siswa cukup tinggi. Hal ini bukan hanya karena faktor suasana belajar di sekolah, akan tetapi sudah mulai ada kesadaran orang tua mendorong anak untuk sekolah,” ujarnya.

Secara umum YAPPIKA-ActionAid mendorong inisiatif lokal di tingkat daerah maupun komunitas bagi pelayanan publik yang inklusif dan responsif gender. Selain pendampingan nonfisik, YAPPIKA Action Aid juga membantu mengatasi persoalan infrastruktur yang dihadapi sejumlah sekolah di Kabupaten Bima. Beberapa fokus dukungan di antaranya membantu

organisasi masyarakat sipil meningkatkan kapasitas organisasi dan keuangan serta mendorong kebebasan berserikat, toleransi, aksi kemanusiaan dan ketangguhan menghadapi bencana.

Akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Dr Syarifudin M.Pd mengatakan, pemenuhan kebutuhan pendidikan inklusi perlu direspon pemerintah daerah melalui penyiapan guru khusus. Selain itu, perlu menyiapkan infrastruktur pendukung.

Syarifudin memberi apresiasi khusus atas keterlibatan berbagai organisasi non-pemerintah di Kabupaten Bima dalam mendorong semangat belajar siswa sekolah dasar terutama di tengah pandemic Covid-19.

“Karena adanya dorongan dari mitra, sekolah bisa lebih baik. Perlu juga diperhatikan guru inklusif dan inovasi sekolah mengelola kelas, sehingga siswa bisa termotivasi lagi. Karena tentu orang tua belum tentu mampu mengajar anak seperti yang didapatkan siswa di sekolah,” ujarnya. (*)

Tekad Kuat Perempuan Penggerak Pendidikan Desa

Kisah Keberhasilan Komunitas Sekolah Kabupaten Sambas
Oleh: Aseanty Widaningsih Pahlevi

DUSUN Makmur, Desa Seburing Gersik letaknya sekitar 25 kilometer dari jalan utama menuju Kabupaten Sambas. Masuk melalui jalan tepian sawah, terus hingga menyeberang melalui sungai dengan jembatan gantung. Jembatan yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Medan yang cukup berat dilalui kendaraan roda empat ini menjadi salah satu penyebab, SDN 15 Seburing Gersik sebelumnya sulit mendapatkan bantuan.

“Sudah lama kami menantikan perbaikan sekolah ini. Alhamdulillah, setelah sekolah menjadi bagus, anak-anak tambah giat belajar. Tak sabar menanti sekolah tatap muka ketika pandemic berakhir,” ujar Dwi Nani Sofianti, ketua Komunitas Sekolah Desa Seburing Gersik.

Nani, panggilan akrabnya, terbilang masih muda. Di usia belum 30 tahun, dia mampu mengorganisir komunitas di mana anggotanya adalah orang-orang yang usianya lebih tua. Anaknya bersekolah juga di SD tersebut. Maka, besar tekad Nani untuk mengajak semua warga dusun agar mau bahu membahu meningkatkan mutu sekolah.

Tidak sedikit tantangan yang dihadapi Nani. Saat ditemui di Dusun Makmur, Nani tengah berada di kediaman bibinya, yang hanya berselang dua rumah dari SD. Di kediaman bibinya, anak-anak sekolah biasanya belajar online. Hanya di tempat itu jaringan internet stabil, lantaran bibi Nani menyediakan jaringan internet. Warga cukup membayar Rp3000 untuk koneksi wi-fi selama empat jam.

“Ini salah satu tantangan warga desa untuk koneksi internet. Kalau anak SD, dilakukan dengan metode rombongan belajar. Jadi guru-guru yang mengunjungi rumah siswa, atau di tempat

yang disepakati bersama,” kisahnya. Nani bilang, seperti kebanyakan warga desa, memulai sesuatu yang baru tidak serta merta mendapatkan sambutan yang hangat.

Omongan miring mengenai komunitas sekolah pernah didengarnya, namun tak pernah diambil hati. Menurutnya, perlu pembuktian manfaat dari komunitas ini, baru orang-orang tergerak untuk ikut serta. Nani menjelaskan kepada warga, bahwa komunitas sekolah mempunyai peranan yang sangat penting, untuk mendukung belajar mengajar anak dan mutu pendidikan di desa. Perkumpulan ini juga merupakan tempat untuk tukar menukar informasi, antar pihak sekolah, dan wali murid.

Banyak hal yang ingin dilakukan, kata Nani, utamanya adalah dengan memanfaatkan lahan sekolah yang luas, untuk menanam padi. Hal serupa yang dilakukan oleh komunitas sekolah di desa lainnya. Namun, ternyata padi mereka gagal panen. Walau demikian, tak menyurutkan semangat anggota, yang mayoritas perempuan.

“Kita sempat pula mencoba menanam sayuran di dalam polybag, tetapi ternyata tanaman dimakan kambing milik warga. Serba salah juga, pelan-pelan kita imbau agar warga mau menambatkan peliharaannya,” kata Nani.

Hal ini pula yang mendorong Nani dan anggota komunitas lainnya, mendambakan agar sekolah mereka bisa dibantu untuk pembangunan pagar. Saat ini sekolah sama sekali tidak mempunyai pagar, sehingga menyulitkan penjagaan keamanan sekolah. Beberapa barang bantuan pemerintah bahkan pernah hilang, lantaran sekolah dibobol maling. “Kalau bisa dihidupkan lagi siskamling, ini sangat bagus. Sekaligus menjaga desa,” harapnya.

Salah satu tantangan lainnya, bagi Nani adalah bagaimana menjaga konsistensi anggota komunitas sekolah untuk ikut serta dalam setiap program. Saat tengah cengkerama di rumah

bibinya, Nani kedatangan ibu-ibu warga setempat, yang juga anggota komunitas sekolah.

Dalam bahasa Melayu Sambas, mereka meminta izin kepada Nani untuk keluar dari komunitas, karena khawatir tidak bisa mengikuti kegiatan. Mereka beralasan, akan sibuk dengan lahan sawah masing-masing sehingga tidak mempunyai waktu cukup untuk ikut kegiatan komunitas. “Saya jawab saja, ini komunitas terbuka. Semua bebas terlibat atau tidak terlibat. Kalau kemarin membuka lahan sawah dirasakan memberatkan, nanti kita bicarakan apa yang cocok bagi komunitas kita,” timpal Nani.

Nani berkisah, dia tengah memikirkan kegiatan apa yang paling cocok dan membawa manfaat bagi warga sekitar. Bisa jadi hal yang sukses di tempat lain, belum tentu cocok di desanya. Untuk itu, dia terus berdialog dengan Lembaga Gemawan, yang juga menginisiasi pembentukan komunitas sekolah di desanya.

“Masih perlu bimbingan dan tukar menukar informasi untuk mencari kegiatan yang cocok. Ada yang menawarkan untuk hidroponik, ada juga apotek hidup. Lalu pakai paranet biar tidak dimakan hewan,” tukasnya. Dia pun mengharapkan, melalui komunitas sekolah dapat menjadi contoh peluang usaha-usaha di desa, sehingga anak-anak muda tergerak untuk membangun desa. Tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah di jenjang SMA, lantaran bekerja di perkebunan kelapa sawit atau bahkan menjadi buruh migran.

Di SDN 19 Medang, tepatnya di Dusun Medang Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, adalah satu potret komunitas sekolah yang berhasil memanfaatkan lahan sekolah untuk ditanami padi. Hasilnya, padi akan digunakan untuk selamatan kelulusan siswa SD serta khataman Al Quran di desanya.

Salah satu tokoh penggeraknya, adalah Rusmini. Perempuan yang juga alumni SD 19 Medang ini tergerak untuk ambil bagian di komunitas sekolah agar semua lini bergerak memajukan pendidikan di desa. Lahan pekarangan SD 19 Medang, dirasakan cukup untuk menanam padi dan hasilnya dinikmati bersama.

Wali murid yang turut ambil bagian, tidak perlu membayar uang perpisahan atau khataman Al Quran, karena padi hasil panen bisa dinikmati bersama. Dalam budaya Melayu Sambas, sudah menjadi hal yang lumrah, di setiap perayaan menikmati hidangan bersama-sama dalam satu tempat penyajian. Biasanya digunakan baki alumunium besar, yang di dalamnya berisi lauk pauk hidangan. Satu baki untuk disantap lima atau enam orang, atau dikenal dengan istilah setempat saprahan.

Pada tahun 2018, Lembaga Gemawan bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid melakukan pendampingan komunitas sekolah. Program ini didukung oleh European Union dalam program bertajuk Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd). Tujuan pendampingan adalah mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berkualitas.

Nuryani, distric coordinator program Pro-InQluEd, mengatakan, ada 10 Komunitas Sekolah (KS) di kabupaten Sambas yang merupakan mitra dampingan. Para koordinatornya telah mendapatkan Aseessment Program Indonesia Pintar (PIP) sejak tahun 2019 lalu.

“Komunitas sekolah mempunyai peran untuk ikut terlibat dan mengawal agar program PIP tersebut tepat sasaran, cepat pencairannya serta dirasakan manfaatnya bagi siswa penerima program ini,” ujarnya.

Untuk level coordinator, memang diperlukan tokoh desa yang mampu menjembatani hal ini berkoordinasi dengan pihak sekolah, komite sekolah, wali murid, bahkan pemerintah desa. Peran komunitas yang mengurai permasalahan di lapangan ini, kata Yani, perlu pula didukung oleh figur-figur di desa yang menjalankan program bersama, untuk mempererat komunitas itu sendiri.

“Ada tokoh-tokoh di desa, yang bisa menerjemahkan permasalahan ini dengan bahasa sederhana, dan memastikan semua warga ikut berperan untuk kemajuan pendidikan di desanya,” lanjutnya. Peran-peran ini kadang bukan pada figur yang mendapat sorotan, karena kecerdasannya atau jaringan yang dimiliki. Tetapi pada komitmen dan kesungguhan menjalankan program, dengan keyakinan tulus, bahwa program yang dijalankan adalah milik masyarakat, dan untuk masyarakat.

Nuryani pun berharap, setelah program Gemawan – Yappika Action Aid selesai, komunitas dapat terus bergerak dan maju bersama. Terlebih anggota komunitas sekolah tidak hanya wali murid di sekolah tepat komunitas itu bergerak. Tetapi bisa siapa saja; kader Posyandu, karang taruna, kader PKK bahkan perangkat desa. “Semua akhirnya merasakan bahwa pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi menjadi tanggungjawab dan kewajiban bersama.

Profil Singkat Penulis

Aseanty Widaningsih Pahlevi. Jurnalis Writer dan sebagai Koordinator Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) Kalimantan Barat. Reporter Tempo di Kalbar (2011 – sekarang) dan sebagai Kontributor Mongabay Indonesia (2013 – sekarang).

Yakobus Ngabi Lalapraing. Koordinator Bidang Advokasi dan Kampanye Yayasan Bahtera, Sumba Barat (2011 – sekarang). Aktif dalam kegiatan programatik bersama YAPPIKA-ActionAid dan juga aktif menulis artikel di media.

Fachrunnas. Anggota AJI Mataram/AJI Indonesia. The Society of Environmental Journalis Simpul NTB (SIEJ)/ Masyarakat Jurnalis Lingkungan Simpul NTB, Tahun 2014 hingga sekarang. Editor in Chief Berita11.com/ Editor Channel TVSebelas NTB (www.TVSebelas.com), Tahun 2014 hingga sekarang. Wartawan Majalah Pariwisata Fortuna

Profil Singkat Penyunting

Rokhmad Munawir. Program Coordinator of Gender Responsive Inclusive Public Service (GRIPS) YAPPIKA-ActionAid

Hardiyanto. Programme Officer for Inclusive Public Service, YAPPIKA-ActionAid

Ari Wahyudi Susatyo. Programme Officer for Inclusive Public Service, YAPPIKA-ActionAid